

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan dan Karya Ilmiah

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2014, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali, Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ayza, Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Pertama Edisi Keempat, PT. Refika Aditama, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2017, *Laporan Tahunan 2016 Direktorat Jenderal Pajak*, diakses dan diunduh melalui laman “<http://www.pajak.go.id/laporan-tahunan-2016-direktorat-jenderal-pajak>” pada tanggal 7 Juli 2018.
- , 2014, *Laporan Tahunan 2013*, diakses dan diunduh melalui laman “<http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2013>” pada tanggal 7 Juli 2018.
- Fitriyani, 2010, *Ekstensifikasi Perpajakan Melalui Penambahan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hutomo, Y.B. Sigit, 2009, *Pajak Penghasilan – Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.

Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurdi, Fajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Marsuni, Lauddin, 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Muttaqien, Raisul, 2016, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), Cetakan Kesebelas, Nusa Media, Bandung.

Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rusjdi, Muhammad, *PPh, Pajak Penghasilan, Edisi Keempat*, PT. Macanan, Klaten.

Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.

Sukardji, Untung, 2014, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Edisi Revisi 2014*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan Pertama
Edisi Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung.

-----, 1990, *Asas-asas dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan
I*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Surya, M Abdurrahman, 2014, *Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha
Kena Pajak atas Perusahaan Terpadu (Integrated), Kelapa Sawit yang
melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang
Tidak Terutang Pajak terhadap Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widyaningrum, Tabita, 2016, *Analisis Kesusuaian Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Persewaan Kendaraan Roda 4
(Empat) atau Lebih di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Asas
Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2016.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pada Tahun 2015.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pada Tahun 2014.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2012.

Internet

Hendra Kusuma, *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*, dalam jaringan, diakses dan diunduh melalui laman “<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>” pada tanggal 16 Mei 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam jaringan, diakses dan diunduh melalui laman “<https://kbbi.web.id/narasumber>” pada tanggal 28 Mei 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam jaringan, diakses dan diunduh melalui laman “<https://kbbi.web.id/patuh>” pada tanggal 7 Juli 2018.